

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Landasan Teori

3.1.1 Pengertian Sistem

Setiap system terdiri dari struktur dan proses. Struktur system merupakan unsur-unsur yang membentuk system tersebut, sedangkan proses system menjelaskan cara kerja setiap unsur system tersebut dalam mencapai tujuan system. Setiap system merupakan bagian dari system lain yang lebih kecil, yang disebut sub system.

Pendekatan system memberikan banyak manfaat dalam memahami lingkungan. Pendekatan system berusaha menjelaskan sesuatu dipandang dari sudut pandang system, yang berusaha menemukan struktur unsure yang membentuk system dan mengidentifikasi proses bekerjanya setiap unsure yang membentuk system. Dengan memahami struktur system dan proses system seorang akan dapat menjelaskan mengapa tujuan dari suatu system tidak tercapai.

Sistem menurut Poerwadinata adalah sekelompok bagian-bagian (alat dan sebagainya), yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud. Apabila salah satu bagian saja rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya maka maksud yang hendak dicapai tidak dapat menjalankan tugasnya maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidaknya system yang suda terwujud akan mendapat gangguan (Inu Kencana dkk, 2006). Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya dengan satu sdengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Selanjutnya dari definisi tersebut dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut (Mulyadi, 2001).

1. Setiap system terdiri dari unsure-unsur
2. Unsur-unsur itu merupakan bagian terpadu system yang bersangkutan
3. Unsur system bekerjasama untuk mencapai tujuan system
4. Suatu system merupakan bagian dari system yang lain yang lebih besar.
5. Setiap system dibuat untuk menangani sesuatu yang berulang kali terjadi atau yang terjadi secara rutin.

3.1.2 Pengertian Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi merupakan salah satu system informasi diantara berbagai system informasi yang digunakan oleh manajemen dalam mengelola perusahaan. Sistem akuntansi berada dalam system informasi akuntansi. Sistem akuntansi adalah organisasi, formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menjadikan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan keuangan perusahaan (Mulyadi, 2001).

Dalam definisi akuntansi, formulir merupakan salah satu unsur system akuntansi. Formulir ini merupakan keluaran system lain yang menjadi masukan system yang dinamakan prosedur. Prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi perusahaan yang sering terjadi.

3.1.3 Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah

Peran penting akuntansi bagi pemda ditunjukkan dalam pasal 51 UU Nomor 7 tahun 2003 yaitu setiap pejabat pengelola keuangan daerah (selaku BUD) dan Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (selaku Pengguna Anggaran) harus menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, pitang, dan ekuitas,

termasuk transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang berada dalam tanggungjawabnya.

Akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemda dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal (Halim, 2007). Pihak eksternal entitas pemda tersebut antara lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), investor, kreditur, donator, analisis ekonomi, rakyat dan pemerintah pusat.

3.1.4 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi laporan keuangan memuat informasi tentang pelaksanaan tanggung jawab manajemen. Laporan keuangan merupakan pernyataan manajemen tentang kondisi perusahaan yang diungkapkan dalam bentuk mata uang (rupiah). Dengan demikian laporan keuangan adalah sepenuhnya tanggung jawab dari manajemen yang merupakan pertanggungjawaban atas kewenangan atas kewenangan mengelola sumber daya perusahaan yang diserahkan pemilik (Darsono, 2005). Menurut (Harahap, 2007) laporan keuangan suatu perusahaan sebenarnya output dari proses akuntansi meliputi kegiatan-kegiatan:

1. Mengumpulkan bukti-bukti transaksi
2. Mencatat transaksi dalam jurnal
3. Memposting dalam buku besar
4. Menyusun laporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang mempunyai fungsi sebagai media informasi dan komunikasi antara intern dan ekstern atau pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan data atau laporan dari hasil kegiatan operasional perusahaan.

3.1.5 Tujuan Laporan Keuangan Daerah

Menurut Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah, Pelaporan keuangan bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, social, maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/deficit-Laporan Operasional (LO), asset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01, Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemda;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemda;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan anggarannya;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan

ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

3.1.6 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Daerah

Menurut Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, karakteristik kualitatif pelaporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif tersebut menjadi prasyarat normative yang diterapkan sehingga laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah terdiri atas:

a) Relevan

Relevan mengandung pengertian bahwa laporan keuangan pemerintah daerah memuat informasi yang didapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya yaitu:

- 1) Laporan keuangan memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya (*feedback value*)
- 2) Laporan keuangan memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk memprediksi masa yang akan datang (*predictive value*)
- 3) Laporan keuangan disajikan tepat waktu (*timeliness*) sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan.
- 4) Penyajian laporan keuangan memuat informasi yang selengkap mungkin (*completeness*) yaitu mencakup

semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan laporan

b) Andal

Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, dapat diverifikasi dan netral.

- 1) Jujur, artinya bahwa laporan keuangan memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- 2) Dapat diverifikasi, artinya bahwa laporan keuangan memuat informasi yang dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali pihak yang berbeda hasilnya harus tetap mempunyai kesimpulan yang sama.
- 3) Netral, artinya bahwa laporan keuangan memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak bias pada kebutuhan pihak tertentu.

c) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah lainnya dengan syarat menetapkan kebijakan akuntansi yang sama.

d) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan

dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman pengguna laporan.

3.1.7 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan

Menurut (Harahap,2006) laporan keuangan bersifat:

- a. Pelaporan bersifat tentatif.
- b. Kebenaran bersifat relative

Menurut (Munawir, 2004) laporan keuangan adalah bersifat historis serta menyeluruh dan sebagai salah satu *progress report* laporan keuangan terdiri dari data yang merupakan hasil dari suatu kombinasi antara fakta yang dicatat, prinsip-prinsip, dan kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi, dan pendapat pribadi.

3.1.8 Komponen Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan pokok pmda terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu kompone laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran pelaporan secara tersandinh untuk suatu periode tertentu. LRA terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. LRA menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan_LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggrannya.
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) sebagaimana diatur dalam PP No 71 tahun 2010 tidak mensyaratkan laporan SAL disajikan oleh entitas pemerintahan. Laporan perubahan SAL menyajikan komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 1. Saldo Anggaran Lebih Awal
 2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun Berjalan (SiLPA)
 4. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
 5. Lain lain, dan
 6. Saldo Anggaran Lebih Akhir
- c. Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu. Posisi keuangan adalah posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Aset adalah sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah, dan dapat diukur dalam satuan uang. Sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya juga termasuk dalam pengertian aset.
- d. Laporan Operasional (LO)
- Sesuai dengan PSAP Nomor 12 dalam PP 71 tahun 2010, LO merupakan laporan keuangan yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:
1. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional
 2. Beban dari kegiatan operasional
 3. Surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional
 4. Pos luar biasa
 5. Surplus/defisit-LO

Laporan operasional disusun melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) yang disusun dengan tujuan:

1. Laporan Operasional, Laporan Perubahan ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Laporan pertanggungjawaban anggaran dapat dibedakan dengan laporan kinerja keuangan.
 3. Dapat diketahui kinerja operasional pemerintah untuk periode pelaporan tertentu.
 4. Laporan Operasional mempunyai nilai prediktif karena informasi dapat digunakan untuk memprediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam periode mendatang.
- e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan keuangan yang menyajikan pos-pos berikut:
1. Ekuitas awal
 2. Surplus/deficit-LO pada periode bersangkutan
 3. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti: (1) Koreksi kesalahan mendasar persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya; dan (2) Perubahan nilai asset tetap karena revaluasi asset tetap.
 4. Ekuitas akhir.
- f. Laporan Arus Kas (LAK) merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas melalui kas daerah selama periode tertentu. Tujuan pelaporan arus kas adalah untuk memberikan informasi tentang: (1) sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan (2) saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bentuk laporan keuangan yang paling tidak terstruktur, namun harus

disajikan secara baik terutama pada penjelasan perpos laporan keuangan harus sesuai dengan tata urutan pos-pos tersebut dalam penyajian laporan keuangan.

3.1.9 Pengguna Laporan Keuangan Daerah

Menurut Kerangka Konspetual Akuntansi Pemerintahan, terapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan daerah yaitu:

- a. Masyarakat
Informasi Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dibutuhkan oleh masyarakat dalam menilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang pendanaannya sebagian besar dari pajak dan retribusi yang dilakukan oleh rakyat.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Legislatif berkepentingan terhadap informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah dalam rangka mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan.
- c. Lembaga Pemeriksa
Lembaga seperti BPK berkepentingan terhadap informasi akuntansi keuangan daerah untuk memeriksa dan memberikan opini apakah pemda dalam pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Analis dan Peneliti
Informasi keuangan daerah sangat diperlukan oleh peneliti dan analis yang digunakan untuk membuat analisis dan riset tentang berbagai hal yang terkait dengan kemampuan ekonomi suatu pemerintah daerah.

- e. Pihak yang member atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman

Informasi keuangan daerah dipergunakan oleh pihak yang memberikan donasi untuk melihat apakah donasi yang diberikannya sudah sesuai dengan tujuan peruntukannya. Investor berkepentingan menggunakan informasi keuangan daerah dalam rangka pengambilan keputusan yang telah atau dilakukannya. Pihak yang member pinjaman berkepentingan untuk menilai apakah entitas pemerintah daerah mempunyai kapabilitas ekonomi untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan.

- f. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat memerlukan informasi pelaporan keuangan pemda untuk mengevaluasi pertanggungjawaban Kepala Daerah karena adanya desentralisasi dalam pengelolaan keuangan Negara yang diserahkan kepada Gubernur/Bupati/walikota selaku pengelola keuangan daerah.

- g. Pemerintah Daerah Lainnya

Sesuai dengan karakteristik utama struktur pemerintahan khususnya adanya transfer pendapatan antar pemerintah, maka pemda lain juga memerlukan informasi pelaporan keuangan pemda lainnya. Selain untuk kepentingan transfer adanya kepentingan ekonomi lain seperti melakukan pinjaman juga menentukan arti pentingnya informasi keuangan daerah.

3.1.10 Fungsi Terkait

Fungsi yang terkait dalam bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi, fungsi yang terkait dalam system informasi akuntansi laporan keuangan daerah adalah:

1. Fungsi Kas

Fungsi ini bertanggung jawab sebagai penerima kas dari pembeli

2. Fungsi Pengeluaran Kas

Jika suatu fungsi memerlukan pengeluaran kas misalnya untuk perjalanan dinas, fungsi yang bersangkutan mengajukan permintaan cek kepada fungsi akuntansi.

3. Fungsi Kepegawaian

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan, baru, membuat surat tariff gaji dan upah karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan dan pemberhentian karyawan.

4. Fungsi Keuangan

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan upah karyawan.

5. Fungsi Akuntansi

Fungsi akuntansi bertanggung jawab melakukan pencatatan atas transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas, serta membuat bukti-bukti kas keluar dan kas masuk serta melakukan verifikasi kelengkapan dan keaslian dokumen pendukung yang dipakai. (Mulyadi,2001)

3.1.11 Dokumen Yang Diperlukan

Dokumen yang digunakan dalam buku yang berjudul Sistem Akuntansi menyebutkan dokumen yang digunakan dalam system informasi akuntansi laporan keuangan dalah sebagai berikut:

1. Faktur Penjualan Tunai.

Dokumen ini digunakan untuk merekam berbagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai penjualan tunai atau sebagai bukti kas masuk.

2. Pita Register

Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan mengoperasikan mesin register kas. Pita register ini merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas.

3. Bukti Setor Bank

Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai penyetoran kas ke bank.

4. Bukti Kas Keluar

Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kassa yang tercantum dalam dokumen tersebut.

5. Cek

Cek merupakan alat yang digunakan untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada organisasi yang namanya tercantum pada cek.

6. Cek Permintaan

Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan pengeluaran cek kepada fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas masuk dan keluar.
(Mulyadi,2001)

3.1.12 Catatan Akuntansi Yang Diperlukan

Catatan yang digunakan dalam buku yang berjudul Sistem Akuntansi menyebutkan catatan akuntansi yang digunakan dalam system akuntansi laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Jurnal Penerimaan Kas

Jurnal Penerimaan Kas digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber.

2. Jurnal Penjualan

Jurnal Penjualan digunakan untuk mencatat dan meringkas data penjualan.

3. Jurnal Umum

Jurnal Umum dalam pencatatan laporan keuangan ini digunakan untuk pendapatan biaya.

4. Jurnal Pengeluaran Kas

Dokumen ini digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran yang terjadi di perusahaan.

5. Register Cek

Dokumen ini digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dengan cek.(Mulyadi, 2001)

3.1.13 Unsur Pengendalian Intern

Unsur-unsur pokok dalam Sistem Pengendalian Intern menurut Mulyadi (2001) adalah:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan rerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan memberikan perlindungan yang memadai terhadap kekayaan , utang , pendapatan, dan biaya
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari setiap unit organisasi
4. Karyawan yang kompetesinya sesuai dengan tanggung jawabnya.

3.1.14 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Menurut Permendagri No 64 tahun 2013 proses penyusunan laporan keuangan sebagai berikut:

1. Menyiapkan kertas kerja
 - a. Mengisi neraca saldo sebelum penyesuaian
 - b. Membuat jurnal penyesuaian
 - c. Membuat neraca saldo setelah penyesuaian

2. Menyusun laporan keuangan
 - a. Menyusun LRA, membuat jurnal penutup LRA, dan Neraca Saldo setelah penutupan LRA
 - b. Menyusun LO, jurnal penutup LO dan neraca saldo setelah Penutupan LO dan neraca saldo setelah Penutupan LO
 - c. Menyusun Neraca, membuat jurnal penutup akhir, dan Neraca Saldo Akhir.
 - d. Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas
 - e. Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan

3.2 Landasan Praktek

3.2.1 Pengertian Laporan Keuangan dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang

Laporan Keuangan adalah laporan yang menunjukkan kemampuan Dinas dalam menghasilkan kinerja keuangan dalam suatu periode akuntansi atau satu tahun.

3.2.2 Komponen-Komponen Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang

Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang terdiri dari 5(komponen) yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

3.2.3 Pengguna Laporan Keuangan

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan daerah yaitu:

- a. Masyarakat
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- c. Lembaga Pemeriksa
- d. Analis dan Peneliti
- e. Pihak yang member atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman
- f. Pemerintah Pusat
- g. Pemerintah Daerah Lainnya

3.2.4 Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam sistem penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang

Dokumen yang diperlukan adalah:

1. Surat Tanda Setoran (STS) untuk transaksi penerimaan kas dan bukti memorial untuk transaksi selain kas.
2. Cek
Sebagai alat untuk melakukan pembayaran.
3. SPJ Penerimaan adalah Surat Pertanggungjawaban Penerimaan
4. SPJ Pengeluaran adalah Surat Pertanggungjawaban Pengeluaran
5. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) adalah spesifik, artinya satu SP2D hanya dibuat untuk satu SPM (Surat Perintah Membayar) saja. SP2D dapat diterbitkan jika:
 - a. Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran- Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan SPD (Surat Penyediaan Dana) yang tersedia mencukupi.
 - b. Apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima SPM.
6. Bukti Transaksi terdiri dari:

- a. Berita acara penerimaan barang
- b. SK Penghapusan barang.
- c. SK Mutasi barang
- d. Berita acara pemusnahan barang
- e. Berita acara serah terima barang
- f. Berita acara penilaian.
- g. Berita acara penyelesaian pekerjaan

3.2.5 Catatan Akuntansi yang digunakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang

a. Transaksi

Suatu kejadian atau situasi yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan.

b. Jurnal

Alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis sesuai dengan waktu terjadinya dengan menunjukkan rekening yang harus di debet dan di kredit beserta jumlah uang nominalnya masing-masing.

c. Buku Besar

Kumpulan dari perkiraan yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan tersendiri.

d. Nerca Saldo

Kertas berkolom yang digunakan sebagai kertas kerja yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi

e. Laporan Keuangan

Output dari proses akuntansi

3.2.6 Fungsi yang terkait pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang

Fungsi yang terkait yaitu:

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

Tugasnya : bertanggung jawab atas penjurnalan sampai penyusunan Laporan keuangan.

b. Pengguna Anggaran

Tugasnya : Pihak yang bertanggung jawab atas Laporan keuangan SKPD.

3.2.7 Proses Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang

Laporan Keuangan sangat diperlukan oleh pihak intern maupun ektern sebagai informasi mengenai suatu keuangan dalam dinas. Laporan keuangan sangat berguna dan dibutuhkan oleh banyak pihak terutama dalam hal pengambilan keputusan juga dapat berfungsi sebagai sumber informasi bagi pihak-pihak yang terkait dalam suatu perusahaan. Berdasarkan dokumen yang telah dibuat dan diterima staf keuangan maka mulailah pencatatan transaksi tersebut. Tahap-tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Transaksi

Kegiatan yang terjadi dalam suatu periode waktu

2. Jurnal

Jurnal berfungsi mencatat dan meringkas pengaruh setiap transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi, sedangkan rekening dan buku besar berfungsi mencatat transaksi.

3. Buku Besar

Semua jurnal yang tercatat diposting ke buku besar pada akhir periode.

Penyusunan Laporan keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan berpedoman pada Permendagri yaitu melalui berapa tahapan. Adapun Laporan keuangan yang harus dibuat:

- a. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran
- b. Menyusun Laporan Neraca
- c. Menyusun Laporan Operasional
- d. Menyusun Laporan Perubahan Ekeuitas
- e. Catatan atas Laporan Keuangan

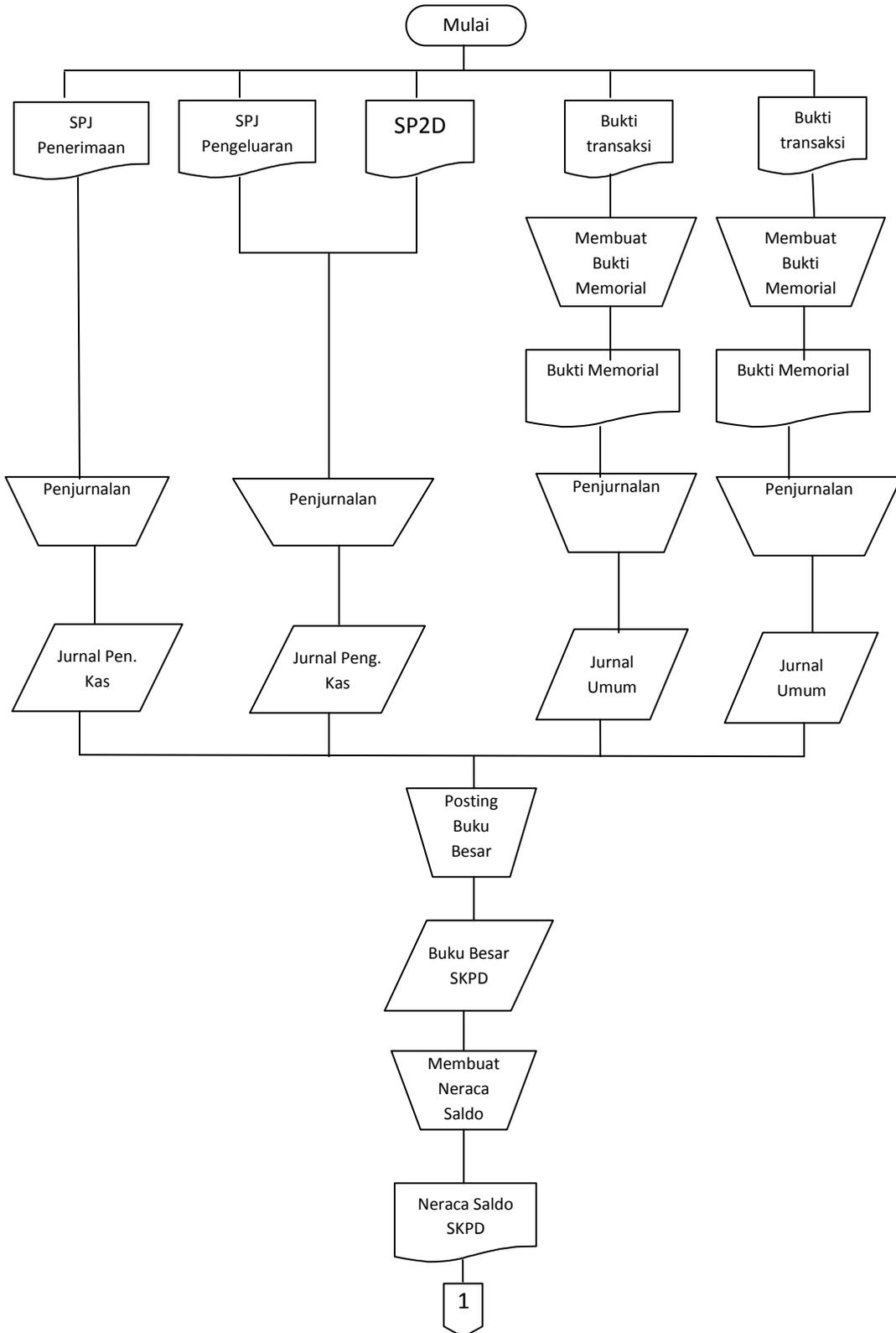
Alasan dinas membuat laporan keuangan dengan tahapan tersebut agar dapat mempermudah perhitungan hasil yang sudah dicapai selama proses pengerjaan. Dinas menyusunnya dengan berurutan atau sistematis karena laporan tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan, jadi harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

3.2.8 Penjelasan Bagan Alir Dokumen(Flowchart) Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang

Sistem penyusunan laporan keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang.

1. Berikut penjelasan singkat dari bagan alir dokumen (flowchart) Akuntansi SKPD :
 - a. PPK-SKPD menjurnal:
 1. SPJ Penerimaan dalam register penerimaan kas
 2. SPJ Pengeluaran dan SP2D dalam register jurnal pengeluaran kas
 3. Bukti memorial transaksi asset tetap dalam register jurnal umum
 4. Bukti memorial transaksi selain kas dalam register Jurnal umum.
 - b. Jurnal-jurnal tersebut oleh PPK-SKPD diposting ke Register Buku Besar SKPD
 - c. Berdasarkan Buku Besar SKPD, PPK-SKPD membuat Neraca Saldo SKPD.
2. Penjelasan singkat dari bagan alir (flowchart) penyusunan laporan keuangan:
 - a. Berdasarkan Neraca Saldo SKPD, PPK SKPD menyusun Laporan keuangan SKPD yang terdiri dari:
 1. Laporan Realisasi Anggaran
 2. Neraca

3. Laporan Operasional
 4. Laporan Perubahan Ekuitas
 5. Catatan atas Laporan Keuangan
- b. PPK-SKPD menyerahkan Laporan Keuangan SKPD kepada Pengguna Anggaran untuk diotorisasi
 - c. Pengguna Anggaran mengotorisasi Laporan Keuangan SKPD dan membuat Surat Pernyataan.
 - d. Laporan Keuangan diarsipkan untuk dokumen kantor
 - e. Selesai



Flowchart Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

